

POLITIK GEMOHING : INSTRUMEN MERAHAI KEKUASAAN POLITIK DI KABUPATEN FLORES TIMUR

Oktavianus Daluamang Payong

Korespondensi Penulis: Viandpayong@gmail.com
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD” Yogyakarta

ABSTRACT

This study aims to understand local culture which is used as a strategy in winning and maintaining political power. Gemohing is the culture of the people of East Flores, Gemohing is the culture of community cooperation. Gemohing itself is the social capital of the community, but in the end it was used by RRK as political capital. From the politics of gemohing, local strongmen were formed. The research method used is a qualitative approach. In this study, researchers collected data using primary and secondary data. The primary data was conducted through detailed interviews with research subjects, namely Robertus Rebon Kereta (RRK), community leaders, religious leaders, success teams, party officials and several community representatives. This research was conducted in East Flores District, precisely in Ile Boleng District and East Adonara District. The results of this study indicate that gemohing was very influential in the four long victories of the RRK in the Legislative Election and became a local strongman in East Flores. The gemohing policy carried out by RRK was to form a group in its electoral base, always visiting the community every week and providing material and non-material assistance to the community. RRK's strategy in maintaining its victory was to apply four processes, namely: the strengthening process, the persuasion process, the rationalization process and the confrontation process.

Keywords: *Gemohing Politics, Local Strongman, Political Strategy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami budaya lokal yang dijadikan sebagai strategi dalam memenangkan dan mempertahankan kekuasaan politik. Gemohing merupakan budaya masyarakat Flores Timur, Gemohing adalah budaya gotong royong masyarakat. Gemohing sendiri merupakan modal sosial masyarakat namun akhirnya digunakan oleh Robertus Rebon Kereta (RRK) sebagai modal politik. Dari politik gemohing tersebut terbentuklah orang kuat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara terperinci bersama subyek penelitian yakni Robertus Rebon Kereta (RRK), tokoh masyarakat, tokoh agama, tim sukses, pengurus partai dan beberapa perwakilan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Flores Timur tepatnya di Kecamatan Ile Boleng dan Kecamatan adonara Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa gemohing sangat berpengaruh dalam kemenangan empat kali RRK lama Pemilu Legislatif dan menjadi orang kuat lokal di Flores Timur. Politik gemohing yang dilakukan oleh RRK adalah dengan membentuk kelompok di basis pemilihannya, selalu mengunjungi masyarakat setiap minggu dan memberikan bantuan materil dan non materil kepada masyarakat. Strategi RRK dalam mempertahankan kemenangannya adalah dengan menerapkan empat proses yakni : proses penguatan, proses bujukan, proses rasionalisasi dan proses konfrontasi.

Kata Kunci : *Politik Gemohing, Local Strongman, Strategi Politik*

PENDAHULUAN

Fenomena munculnya orang kuat lokal di Indonesia memasuki era baru, hal ini ditandai dengan adanya sistem desentralisasi yang melibatkan banyak faktor, institusi, dan budaya lokal yang mulai bermunculan dan memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal terorganisir, dan memiliki simbol lokal yang dibawa ke panggung politik (Nordholt, 2007). Kehadiran sistem desentralisasi melalui otonomi daerah menciptakan arena atau babak baru dari kontestasi pertarungan dan perseteruan kekuatan politik untuk saling menguasai di ranah lokal, sehingga muncul elit-elit di tingkat lokal yang memanfaatkan kesempatan untuk terus mengakumulasi dan mengumpulkan kekayaan sebesar-besarnya. Di samping itu juga, desentralisasi membuka peluang bagi para penguasa atau orang kuat lokal tumbuh dengan subur dan berkembang dengan cepat, serta memberikan warna dalam perpolitikan di berbagai daerah di Indonesia dan memanfaatkan peluang yang besar mengumpulkan kekayaan dan sumber daya yang ada.

Orang kuat lokal hadir karena adanya kepentingan dalam suatu kekuasaan. Tujuan utama dalam meraih kekuasaan adalah untuk mendapatkan kemenangan

dan posisi politik yang berkelanjutan. Dalam upaya meraih kekuasaan, seorang aktor bisa melakukan mobilisasi dukungan melalui berbagai instrumen. Partai politik menjadi salah satu informan yang sering dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi dukungan. Selain partai politik, terdapat sejumlah instrumen lain yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan mobilisasi dukungan dalam rangka meraih kekuasaan diantaranya dengan cara memobilisasi dukungan di ranah birokrasi dan juga di ranah kemasyarakatan. (Haryanto,2015)

Pemanfaatan suatu tradisi di masyarakat adalah salah satu instrumen untuk meraih kekuasaan, salah satunya adalah karena tradisi meraih kekuasaan masih relatif kental mewarnai aktivitas ditengah masyarakat lantaran adanya pengelompokan berdasarkan etnisitas. Terkait dengan hal itu kajian dalam tulisan ini berfokus pada bagaimana seorang aktor memanfaatkan tradisi atau budaya lokal sebagai instrumen demi meraih kekuasaan melalui mekanisme Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sehubungan dengan hal itu, kajian ini dikategorikan dalam studi orang kuat lokal, yakni upaya melakukan penggalangan atau memobilisasi dukungan dari masa untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan

dalam waktu yang lama. Umumnya, dalam rangka menggalang dukungan seorang aktor bisa memanfaatkan berbagai instrumen dan cara demi meraih kekuasaan. Studi orang kuat lokal berkiblat kepada teorinya (Migdal, 2004) Orang kuat lokal didefinisikan sebagai kekuatan informal yang berupa tuan tanah, saudagar, pengusaha kaya, kepala suku, panglima perang, bos petani kaya, pemimpin golongan, pemimpin sekte agama, tokoh adat dan lain sebagainya, yang berusaha menguasai kontrol atas masyarakat dalam cakupan wilayah tertentu lewat kerja sama jejaring yang mereka bangun. Ringkasnya, keberhasilan *local strongman* atau orang kuat lokal dalam mencapai monopoli dan kontrol sosial mereka di masyarakat didasari atas tiga faktor utama. Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring dimana klientelisme tumbuh subur dan berkembang. Sehingga kontrol sosial terfokus pada kekuatan - kekuatan yang ada, karena tidak mampu dimonopoli oleh negara. Kedua, karena mindset yang mendarah daging yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol tersendiri di antara mereka, yang mana orang kuat menjadi panutan di kehidupan masyarakat lokal. Ketiga, kemampuan orang kuat lokal mengintervensi lembaga yang ada di daerah sehingga menjadikan alur lembaga

pemerintahan disana berpihak kepada kepentingan mereka.

Salah satu faktor terbentuknya *local strongman* disebabkan oleh budaya atau tradisi masyarakat. Seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Flores Timur, pola hidup masyarakat dibentuk dari relasi sosial dan budaya yang begitu kental. Salah satu budaya Flores Timur adalah Gemohing. Gemohing merupakan kerja sama gotong-royong dalam sebuah ikatan kelompok kerja yang ditujukan untuk membantu seorang pemilik kebun membersihkan atau mengerjakan lahan pertaniannya, yang dijalankan secara berkelanjutan untuk tiap-tiap anggota kelompok. Gemohing pada awalnya terbentuk atas dasar ikatan kelompok dalam mengerjakan atau membersihkan kebun bersama secara bergilir namun sejalan dengan berkembangnya waktu gemohing tumbuh menjadi modal sosial dan berkembang menjadi modal politik. Nilai yang terkandung dalam gemohing adalah solidaritas, kekerabatan, dan kekeluargaan.

Dalam kajian politik Indonesia, khususnya studi tentang tradisi atau budaya lokal dijadikan sebagai instrumen politik, kajian ini dikaitkan dengan studi politik yang dilakukan oleh Haryanto, 2015 tentang Politik Kain Timur. Perbedaannya terletak

pada *kain timur* sebagai instrumen pertukaran sedangkan *gemohing* merupakan instrumen untuk ‘kerja sama’ tetapi sama-sama bertujuan untuk mendapat dukungan politik. Dalam politik kain timur memberi berarti harus dikembalikan baik berupa barang ataupun dukungan dalam politik sedangkan dalam *gemohing* mengutamakan gotong royong dalam artian adanya sistem kerja secara bergilir dan dalam kaitan dengan dukungan politik semakin banyak seseorang menempatkan diri dalam bergotong royong maka porsi kerja atau dukungannya semakin banyak. Dengan kata lain di dalam *gemohing* juga mengenal hukum timbal balik.

Kajian dalam penelitian ini sepenuhnya membahas tentang seorang aktor politik lokal Robertus Rebon Kereta selanjutnya disebut RRK yang memanfaatkan tradisi atau budaya lokal *Gemohing* sebagai instrumen dalam dukungan politik sehingga RRK terpilih selama empat kali dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Flores Timur. RRK merupakan satu satunya anggota DPRD yang selalu terpilih dalam pemilu Legislatif Daerah empat periode terakhir. Hal ini kemudian meletakkan RRK sebagai salah satu orang kuat lokal yang mempunyai pengaruh besar dalam perpolitikan di Kabupaten Flores Timur.

Letak permasalahan yang menjadi alasan kajian dalam penelitian ini karena longgarnya sistem pemilu di Indonesia yang tidak membatasi masa jabatan dari para anggota legislatif. Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan mengenai syarat pencalonan keanggotaan DPR, DPD dan DPRD tidak ditemukan pasal yang menjelaskan bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD tidak dapat mencalonkan diri setelah menang dalam satu atau dua periode pemilihan. Hal ini kemudian menjadi celah munculnya orang kuat lokal di daerah dan juga di Indonesia. Fokus kajian penelitian ini adalah untuk menjawab mengapa masyarakat selalu memilih RRK dan bagaimana *gemohing* mempengaruhi kemenangan dari RRK. Dari permasalahan yang timbul di atas inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji serta menjawab bagaimana *gemohing* mempengaruhi kemenangan Robertus Rebon Kereta dalam Pemilu Legislatif Daerah Kabupaten Flores Timur dan mengapa masyarakat selalu memilih RRK dalam Pemilu DPRD Kabupaten Flores Timur selama empat periode berturut turut.

Untuk menganalisis fenomena maka digunakan konsep sebagai berikut: Konsep Haryanto; 2015 dengan judul Politik Kain Timur : Instrumen Meraih Kekuasaan. Kajian dalam penelitian di atas adalah membahas perihal upaya seorang aktor meraih kekuasaan melalui mekanisme kontestasi pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut Pilkada. Penelitian ini membahas mengenai seorang aktor Non Papua bernama Otto Ihalauw yang menjadi Bupati di Kabupaten Sorong Selatan dengan menggunakan strategi politik Kain Timur. Kain Timur yang dimaksud adalah kain yang berfungsi sebagai alat tukar sosial ekonomis, dapat dipergunakan dalam hubungan tukar menukar sebagai hadiah antar teman, dalam upacara perkawinan sebagai alat bayar mas kawin, dan dalam kegiatan dagang sebagai alat tukar. Otto Ihalauw yang merupakan orang Non Papua yang sebelumnya diangkat sebagai pejabat Bupati Sorong Selatan untuk maju kembali menjadi calon bupati.

Bahasan tradisi pertukaran kain timur dalam kaitannya dengan mobilisasi dukungan dipilah menjadi dua yakni pertama, mobilisasi dukungan dalam aktivitas pemerintah dan kemasyarakatan dan kedua, mobilisasi dukungan dalam aktivitas elektoral. Dalam hal mobilisasi aktivitas pemerintah Otto Ihalauw

memainkan strategi dengan cara mobilisasi dukungan di ranah birokrasi. Otto Ihalauw memanfaatkan jaringan birokrasi untuk menggalang dukungan massa dengan cara menempatkan posisi jabatan penting berdasarkan etnisitas. Dalam hal mobilisasi kemasyarakatan Otto mengambi simpati masyarakat dengan membangun rumah sakit yang sebelumnya masyarakat harus berobat ke Kabupaten Sorong yang jaraknya cukup jauh. Selain itu di bidang ekonomi Otto Ihalauw membangun pasar rakyat yang sebelumnya tidak terletak di tempat yang strategis sehingga semakin banyak jangkauan masyarakat. Dalam hal mobilisasi dukungan di ranah politik Otto Ihalauw memainkan peran dengan menjadi ketua Umum partai Golkar, memiliki hubungan erat dengan anggota DPRD dan juga memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD dari partai lain. Cara mobilisasi dukungan yang dilakukan oleh Otto Ihalaw tersebut yang dianalogikan sebagai pemberian kain timur. Semua pemberian berdasarkan budaya setempat pasti ada balasannya dan balasan dalam penelitian ini adalah dengan mendukung Otto Ihalauw dalam pemilu Bupati di Sorong.

Kajian dari Haryanto menemukan bahwa Otto Ihalauw yang latar belakangnya dari birokrat menggunakan tiga model

mobilisasi dukungan yakni melalui mobilisasi dukungan dalam birokrasi, kemasyarakatan dan dukungan ranah politik sedangkan posisi penelitian yang akan dilakukan RRK tidak menggunakan pendekatan secara birokratis, latar belakang RRK yang bukan dari orang birokrasi menjadi pembeda dengan penelitian di atas

Ada pun penelitian yang dilakukan oleh Tito Handoko; 2020 dengan judul Fenomena *Local Strongman*, studi kasus pengaruh Sukarmis dalam mendukung Andi Putra sebagai DPRD Kuantan Tinggi. Hasil kajian ini menggambarkan bahwa local strongman dalam politik lokal tidak hanya dipengaruhi oleh orang kuat lokal yang berperan diluar struktur pemerintahan atau struktur politik. Akan tetapi local strongman dapat berperan dalam struktur birokrasi dan struktur politik bahkan mampu berperan dalam struktur politik dan struktur pengusaha. Kajian ini juga akan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, dalam penelitian ini RRK dalam membentuk kekuatan lokal di daerah tidak dipengaruhi oleh struktur politik yang terikat tetapi RRK membentuk sendiri ikatan politik lokal dengan caranya dan tanpa ada kaitannya dengan birokrasi setempat.

Dalam penelitian lain (Minan, 2015) menjelaskan bahwa *local strongman*

merupakan actor tingkat lokal yang memiliki pengaruh sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. *Local strongman* sebagai elit lokal dalam struktur sosial mereka berfungsi sebagai administrator, agiator, pemersatu, penyebar, propaganda idiologi, dan broker politik. Hasil dari kajian Minan adalah bahwa *local strongman* memiliki peran sebagai aktor yang memiliki fungsi dalam struktur sosial dengan agen sosial, yaitu tokoh agama dan pengusaha. Tidak menutup kemungkinan aktor sosial menjadi orang kuat lokal, begitu juga dengan aktor politik. Fenomena orang kuat lokal merupakan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi, lahirnya orang kuat pada beberapa daerah mempengaruhi politik lokal. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah RRK menjadikan politik sebagai sarana untuk melayani.

Lal Strongman dan Bosisme Lokal

Istilah *Local Strongman* diperkenalkan oleh Joe Migdal dalam kajiannya tentang fenomena orang-orang kuat lokal di negara-negara dunia ketiga (post colonial) pada decade 1970-an. Sementara istilah *Local Bossism* dipromosikan oleh John T. Sidel, Doktor Ilmu Politik alumnus Cornell University tahun 1995 yang banyak melakukan studi tentang Asia Tenggara, khususnya untuk

isu-isu politik lokal dalam lanskap perbandingan politik internasional. Istilah ini digunakan Sidel sebagai “alternasi/alternatif” dari konsep *Local Strongman* yang diperkenalkan Migdal.

Secara sistematis, kedua istilah ini jelas berbeda. Tetapi sebagai tema akademik, keduanya memiliki beberapa kesamaan disamping perbedaan-perbedaan. Kesamaannya terletak pada gejala, bahwa keduanya adalah elemen masyarakat lokal yang memiliki kemampuan mempengaruhi secara determinatif bahkan sampai batas tertentu mengontrol kekuasaan

Mengenai *local strongman*, seperti ditulis Sidel dalam bukunya, Migdal menulis : “*They have succeed in having themselves or their family members placed in critical state posts to ensure allocation of resources according to their own rules, rather than the rules propounded in the official rhetoric, policy state-ments, and legislation generated in the capital city or those put forth by a strong implementor.*” Intinya Migdal menyatakan, bahwa orang-orang kuat lokal telah berhasil menempatkan diri dan anggota keluarga mereka ke dalam jabatan penting di dalam pemerintahan lokal untuk menjamin dan memastikan alokasi sumber daya agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main yang mereka kehendaki ketimbang aturan-aturan

main yang diungkapkan dalam retorika para pejabat, pernyataan-pernyataan kebijakan dan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh pemerintah lokal atau pemerintah pusat.

Migdal mengemukakan beberapa poin yang saling berhubungan mengenai fenomena keberhasilan *local strongman* mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi daerah yakni:

- 1) *Local strongmen* telah mengembangkan “*weblike societies*” (masyarakat berjejaring) melalui organisasi otonom yang mereka miliki dan dikendalikan dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial.
- 2) *Local strongmen* melakukan kontrol sosial melalui distribusi komponen yang disebut “*strategies of survival*” (strategi untuk bertahan hidup) dari masyarakat lokal. Pola ini kemudian menghasilkan model personalism, clientalism, dan relasi patron-client yang sangat kuat, dimana mereka hadir menjadi semacam “penolong” masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka.
- 3) *Local strongmen* menguasai state agency dan sumber daya, sehingga agenda kebijakan merupakan hasil kompromi dengan kepentingan local

strongmen. Local strongmen melakukan kontrol dan limitasi atas otonomi dan kapasitas negara yang tidak berdaya di hadapan pengaruh mereka.

Pengertian bos lokal dalam penelitian (Holifah, 2012) merujuk kepada broker lokal yang menikmati posisi monopolistik atas cara kekerasan dan sumber ekonomi dalam wilayah kekuasaan mereka masing-masing, seperti posisi walikota/bupati yang menjalankan daerahnya layaknya kekuasaan pribadi mereka sendiri, atau kalangan dewan dan gubernur yang membangun mesin politik dan kerajaan bisnis yang merentang di seluruh distrik atau provinsi. Bos lokal ini hadir dengan mekanisme pemilu yang kompetitif dan berkala serta diikuti partisipasi politik yang tinggi. Mereka menggunakan berbagai strategi dari pembelian suara, manipulasi hingga intimidasi dengan penggunaan kekerasan ataupun uang. Bosisme beroperasi dalam bayangan rezim otonomi daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman. Para “*bossism local*” menggunakan aparatur negara untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti kehendaknya.

Bossism local ada di setiap tingkatan, ada bos yang menguasai wilayah pada

(kabupaten/kota), ada bos yang menguasai provinsi dan ada bos yang menguasai pusat. Jejaring patron-klien para “*bossism local*” tidak statis dan permanen, melainkan dinamis dan sangat cair. Mereka bisa berpindah-pindah patron di tingkat pusat, berpindah-pindah klien di tingkat lokal dan berpindah-pindah afiliasi partai politik nasional. Bosisme Lokal melakukan transaksional suara pemilih dengan bantuan ekonomi (berbentuk uang tunai, sembako, bibit, irigasi, pelunasan hutang dan alat tukar lainnya). Mereka sangat mengerti dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pekerjaan, memberikan bantuan hukum, maka kemudian ketika hari H pemilihan umum, mereka mengubah bantuan-bantuan yang mereka berikan menjadi suara dan dukungan politik. Berbagai strategi dilakukan *bossism local* untuk mempertahankan dominasinya dalam bidang ekonomi dan politik. Strategi tersebut diantaranya:

1. Menempatkan keluarga dan kroni sebagai walikota/bupati, wakil dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
2. Mengatur penempatan posisi pejabat daerah
3. Mengatur alur dan pilihan proyek pembangunan pemerintah

4. Mengatur pembentukan peraturan daerah
5. Mengatur keringanan pajak
6. Mengatur pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah
7. Memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan

8. Intimidasi dan kekerasan politik
9. Menerapkan kebijakan diskriminatif untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh.

Perbandingan Orang Kuat Lokal Bertahan Hidup menurut Magdal dan Sidel dalam (Solissa, 2016) antara lain

Perbandingan	Joel. S Magdal	John T. Sidel
Istilah	Local Strongman	Local Bossism
Aktor	Kepala suku, Tuan Tanah, Pimpinan Tradisional Dll	Kepala daerah, anggota dewan, pengusaha Dll.
Perspektif	Historis kultural	Struktural
Latar Belakang Ekonomi	Selalu Orang Kaya	Tidak Selalu Orang Kaya
Proses Pembentukan	Fragmentasi masyarakat Independensi antar organisasi sosial di negara baru merdeka	Kegagalan pemerintah Memberikan kesejahteraan rakyat.
Aktor	Tuan Tanah, Kepala Suku, Panglima Perang, Pemimpin Klan, Pemimpin Tradisional	Kepala Daerah, Legislator Mantan Komandan Militer, Pengusaha
Cara Bertahan Hidup Aktor	Memfaatkan hubungan patron klien, orang kuat lokal, politisidan birokrat.	Mengandalkan dukungan investor dan negara dalam perekonomian yang kapitalistik

Gemohing Sebagai Modal Sosial

Masyarakat Desa di Kabupaten Flores Timur umumnya sudah lama mengenal tradisi kerja bersama secara bergilir dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Konsep kerjasama itu diberi nama "*gemohing*" atau "*gemohin*" atau "*moit.*" Dalam penelitian (Frans 2019) dijelaskan Istilah gemohing berasal dari kata bahasa Lamaholot, (bahasa daerah setempat) yaitu: "gemohe"

yang berarti membantu atau bekerja bersama secara bergilir berdasarkan prinsip tolong menolong, atau saling melayani di antara mereka tanpa membedakan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Warga terlibat dalam gemohing selalu merasa saling ketergantungan dan secara tidak sadar telah membentuk karakter sosial mereka dalam menghargai hak dan kewajiban satu sama lain sebagai satu komunitas. Pada mulanya gemohing hanya bergerak di bidang pertanian semata

oleh sekelompok petani. Hal ini logis diterima karena inisiatif kerjasama, awal mulanya datang dari para petani yang mau bersama-sama secara bergotong royong mengerjakan lahan pertaniannya secara bergilir. Lambat laun orientasi kegiatan tidak saja di bidang pertanian, melainkan makin meluas menjangkau bidang sosial lain.

Apabila gemohing dicermati dari perspektif modal sosial, maka sesungguhnya dalam gemohing pun terkandung beberapa elemen utama, antara lain: adanya kerjasama, norma, partisipasi, saling membantu atau menolong dalam menghadapi masalah sosial. Elemen-elemen gemohing tersebut tumbuh dan berkembang secara alamiah melalui proses interaksi sosial atau relasi dalam jangka waktu lama, kemudian mendorong lahirnya saling percaya diantara anggota masyarakat dalam membangun jaringan dan pranata sosial atas dasar kebutuhan bersama menghadapi berbagai perolehan sosial.

Kebiasaan unik lain dari gemohing pun tampak pada kebersamaan ketika hendak mengambil keputusan penting yang berkenaan dengan kepentingan bersama, yaitu selalu menekankan pada aspek musyawarah atau *pe-ephut* berdasarkan asas

kekeluargaan. Karena itu dalam proses pengambilan keputusan selalu ada pertukaran ide dan perbedaan. Biasanya kelompok masyarakat yang terbentuk dan beraktivitas berdasarkan profesi dan ikatan suku akan lebih mudah mengambil keputusan dan digerakkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa yang lebih besar.

Gemohing dalam dinamika sosial dan pembangunan dapat dimaknai lebih luas sebagai sebuah strategi pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek dan obyek utama penggerak prakarsa, inisiatif, kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam mengelola tantangan pembangunan dan aktivitas sosial budaya lain, seperti pertanian, pembangunan jalan dan rumah warga, upacara perkawinan dan kematian serta dapat mengatur cara menikmati hasilnya bersama secara adil sesuai kontribusi yang diberikan. Atau yang oleh Marx disebut sebagai produksi nilai lebih bersama dan dinikmati secara bersama secara adil. Itu berarti gemohing dapat dilihat sebagai aset atau kekayaan kolektif yang bernilai tinggi, karena dapat menjadi alat kontrol efektif bagi warga atas sumber daya yang dimiliki masyarakat.

Representasi Politik dan Strategi Dalam Mempertahankan Kemenangan

Strategi politik didefinisikan oleh Firmanzah dalam (Fitriah,2020) sebagai “Semua cara, metode dan teknik yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan politik yang telah dirumuskan”. Menurut Osuagwu dalam (Fitriah,2020;112) pada sebagian besar negara demokrasi di dunia para politisi dan partai politik mencari teknik pemasaran yang taktis dan strategis untuk membuat diri mereka relevan dimata pemilih dan mendapatkan dukungan suara dalam pemilu atau kembali dipilih pada pemilu berikutnya, para politisi dan partai politik menyadari perlunya mencocokkan penawaran politik mereka dengan nilai-nilai inti audiens yang relevan. Maka, strategi keterpilihan petahanan adalah cara, metode dan teknik yang digunakan calon petahanan dalam mengikuti kontestasi pemilu melalui jabatan sebagai wakil rakyat guna terpilih kembali dengan mempertimbangkan aspek nilai-nilai inti audiens yang relevan.

Politik dalam memperebutkan atau mempertahankan suara bisa dilakukan melalui empat proses, yaitu (1) reinforcement process (proses penguatan), yakni menjaga orang dalam sikap positif melalui memperkuat perilaku, memperkuat

sikap atau memperkuat keduanya; (2) inducement process (proses bujukan), yakni mengubah perilaku orang dalam sikap negatif menjadi positif; (3) rationalization process (proses rasionalisasi), yakni menghasilkan perubahan sikap perilaku yang lebih konsisten; dan (4) confrontation process (proses konfrontasi), yakni mengubah perilaku sosial dalam opini publik dengan menggunakan basis kekuatan yang dimiliki untuk mengubah perilaku sosial secara masif. Setiap elemen dapat dijadikan sebuah strategi untuk memperebutkan atau mempertahankan suara didalam pemilu.

Kepesertaan petahana diakui dalam pemilu lebih unggul dibanding pendatang baru, sebagai petahana ia menguasai sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk memenangkan suara. Petahana, melalui fungsi representasi selama menjabat di lembaga perwakilan punya ruang untuk memelihara basis suaranya. Aktivitas reses per-empat bulan sekali memberi kesempatan anggota DPRD pulang ke dapilnya, bertemu konstituen, dan melakukan fungsi representasi politik. Artinya, representasi politik menjadi sebuah dasar yang bermakna bahwa orang yang merasa dirinya diwakili bisa memberikan banyak permintaan kepada wakilnya agar dapat diteruskan ke lembaga

perwakilan. Fungsi representasi politik ini bila dikelola dengan baik akan memperkuat basis dukungan yang berguna saat pemilu.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Robertus Rebon Kereta (RRK) lahir di Lewobunga pada tanggal 2 November 1968. Latar belakang keluarga RRK dapat dinyatakan berperan besar dalam membentuknya sebagai individu yang sederhana, religius dan menghormati adat dan budaya lokal. Kedua orang tua RRK adalah orang yang taat beragama sehingga ketaatan ini mengalir ke RRK dan juga saudara saudarinya. RRK dilahirkan dalam keluarga yang religius. Sebagai orang Katolik yang taat, semasa mudanya RRK dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan baik di lingkungan desanya, di tingkat dekenat sampai kepada tingkat Keuskupan Larantuka. Ketaatan dalam kehidupan religi berdampak dalam kehidupan sehari-hari, dimana RRK dikenal sebagai individu yang perasa terhadap kesusahan orang lain dan juga sebagai individu yang relatif mudah memaafkan kesalahan orang lain. Perjalanan karir politiknya juga diwarnai karakter tersebut. RRK mengawali pendidikan formal di SDK I Kiwangona pada tahun 1976 sampai tahun 1982, SMPK Lembah Kelapa tahun 1982 sampai 1985, SMA Negeri 468 Larantuka tahun 1985

sampai 1988 dan melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Patimura FKIP Ambon pada tahun 1988 sampai menyangang status sarjana pendidikan pada tahun 2007.

RRK mulai terjun ke dunia politik diawali dengan aktif berorganisasi selama di kampus dan bergabung menjadi Kader PDI Perjuangan. Bergabung bersama PDI Perjuangan merupakan anugerah terbesar bagi RRK karena sudah membawa RRK menjadi elit lokal yang bertahan sampai saat ini. Keaktifan RRK di PDI Perjuangan terlihat sejak tahun 2000 sampai 2005 menjadi Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Adonara Timur. Tahun 2005 sampai 2010 menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Bidang Pembangunan Daerah dan dari tahun 2015 sampai sekarang RRK menjabat sebagai Sekertaris PDI Perjuangan Kabupaten Flores Timur. RRK memulai karir politiknya dengan menjadi guru honorer di beberapa sekolah yakni yakni SMA Negeri I Adonara Timur, SMA Surya Mandala, SMA Muhammadiyah Lamahala, SMK Suryamandala dan MA DDI Waiwerang (MAN Waiwerang). RRK tidak memulai karir politiknya dari birokrat, Ia benar benar memulainya dari bawah. Sempat berpikir untuk mengikuti seleksi PNS untuk tetap menjadi guru namun karena semangat untuk membangun

daerah akhirnya RRK memutuskan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD.

Gemohing Membentuk Kekuatan Lokal

Gemohing pada dasarnya sudah diletakan sebagai dasar pembangunan di Flores Timur. Gemohing dijadikan sebagai modal sosial dalam pembangunan. Hal ini diterapkan dalam kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pembangunan di Flores Timur. Terlepas dari terpilihnya RRK, Bupati Flores Timur juga menjadikan gemohing sebagai modal untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang ada di Flores Timur. Modal sosial tersebut dimanfaatkan oleh RRK untuk membangun kekuatan politik lokalnya. RRK menggunakan gemohing sebagai sarana untuk merangkul masyarakat. RRK mempengaruhi masyarakat dengan memberikan sumbangan dan terlibat dekat dengan masyarakat.

Kekuatan lokal RRK sangat dipengaruhi oleh politik gemohing. Politik gemohing yang dibentuk dari budaya masyarakat menjadi modal sosial dan oleh RRK dijadikan sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan politik. Temuan di lapangan pola RRK dalam memanfaatkan gemohing sebagai modal untuk membentuk kekuasaan politik adalah sebagai berikut. Pertama, RRK membentuk kelompok

masyarakat di daerah pemilihannya. Kelompok tersebut yakni GEMPITA (Gerakan Muda Mudi Desa). Di dalam gemohing itu sesungguhnya adalah ikatan kerja sama atau gotong royong antar masyarakat, dengan membentuk kelompok tersebut RRK dengan mudah terlibat langsung dengan masyarakat, dengan mudah memberikan bantuan atau sumbangan kepada masyarakat. Balasan dari masyarakat adalah mendukung dan memilih kembali RRK dalam pemilihan umum, inilah yang dinamakan politik gemohing. Kedua, RRK memberikan perhatian khusus pada kelompok kategorial baik keagamaan, kelompok tani dan nelayan serta kelompok lainnya. Maksud perhatian secara khusus RRK terhadap kelompok tersebut adalah RRK mendukung program pemerintah dan sentuhannya programnya langsung diarahkan kepada kelompok tersebut, selain dari pada itu RRK juga memberikan sumbangan baik secara materil maupun non materil kepada masyarakat. RRK memberikan atau menjual jasanya kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dan balasannya masyarakat mendukung dan memilih kembali RRK dalam Pemilu. Ketiga, Rutin mengunjungi masyarakat setiap akhir pekan. Inilah salah satu strategi RRK yang jarang dilakukan oleh anggota DPRD yang lainnya. RRK setiap hari sabtu melakukan

kunjungan ke masyarakat dari satu desa ke desa yang lainya setiap minggunya. Dengan menerapkan tiga hal di atas RRK memperoleh dan membentuk kekuatan politik dan hal tersebut dibuktikan dengan kemenangan empat kali dalam Pemilu DPRD Flores Timur.

Local Strongman di Kabupaten Flores Timur

Local strongman yang terjadi di Kabupaten Flores Timur dibetuk dari pola vertikal. Saat ini kekuatan politik di Flores Timur dikendalikan melalui dominasi partai PDI Perjuangan dalam menguasai ranah eksekutif dan legislatif. Pola vertikal yang dimaksud adalah dominasi partai PDI Perjuangan sehingga dengan mudah menggerakkan organisasi atau masyarakat di bawahnya dalam mendukung kekuatan politik yang telah ada. Saat ini jabatan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Flores Timur dikuasai oleh PDI Perjuangan. Bupati Flores Timur adalah ketua DPC PDI Perjuangan dan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur adalah Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Dukungan kuat dari masyarakat terhadap PDIP karena partai ini telah membentuk relasi baik secara person, patron client dan clientalism yang sangat kuat.

RRK sebagai salah satu elite lokal dan juga sebagai orang kuat lokal berhasil

melakukan kendali dan kontrol terhadap kebijakan yang ada di Flores Timur. RRK berhasil mempengaruhi masyarakat karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring dan klientilisme tumbuh subur dan berkembang. RRK sudah menjadi simbol tersendiri di antara masyarakat, yang mana ia menjadi panutan di kehidupan masyarakat lokal dan kemampuan RRK mengintervensi lembaga yang ada di daerah sehingga menjadikan alur lembaga pemerintahan disana berpihak kepada kepentingan mereka. RRK membentuk kekuatan lokal dengan cara masuk di partai politik yang memiliki basis yang sangat besar di Flores Timur, menggunakan strategi yang tepat dalam mempengaruhi masyarakat dan menjaga nama baiknya dengan cara tidak pernah terlibat dalam kasus hukum. Kemenangan empat kali dalam pemilu DPRD Kabupaten Flores Timur sudah membuktikan bahwa RRK adalah salah satu orang kuat yang ada di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Strategi Mempertahankan Kekuasaan Politik

Ada empat proses yang dilakukan oleh RRK dalam memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan politik yakni :

1. Reinforcement Process (Proses Penguatan)

Strategi reinforcement merupakan salah satu pola strategi yang menekankan kepada sikap dan kepribadian. Proses ini dilakukan untuk menjaga orang dalam bersikap positif melalui memperkuat sikap, memperkuat perilaku atau memperkuat keduanya. Proses ini mengangkat nilai-nilai sebagai suatu kebutuhan (need) bukan sekedar kemauan (wants) berbasis pada keadilan (justice) bukan sekedar (charity) : keadilan yang bukan bersifat individual tetapi terstruktur dan terlembaga dan tidak sekedar memanipulasi sumber-sumber kekayaan, kekuasaan, informasi dan pengaruh. RRK dalam mempertahankan kekuasaan politik menerapkan proses penguatan dengan cara mempertahankan moral dan etika yang baik di mata masyarakat. Selama menjabat sebagai anggota legislatif RRK tidak pernah terlibat dalam kasus apapun yang dapat mencoreng nama baiknya. Proses penguatan juga dilakukan oleh RRK kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan budaya Gemohing antara masyarakat, saling tolong menolong, toleransi satu sama lain sehingga proses pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik.

2. Inducement Process (Proses Bujukan)

Proses bujukan ini sebetulnya adalah lebih kepada mengubah perilaku seorang dalam bersikap negatif menjadi positif, tetapi dalam proses mempertahankan dan memperkuat kekuasaan maka proses bujukan ini lebih menekankan kepada bujukan untuk tetap mendukung elite politik. Caranya adalah dengan memberikan sentuhan program atau bantuan secara berkelanjutan, merubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melibatkan masyarakat dalam program pemerintah baik di lingkup desa sampai kepada lingkup daerah dan bujukan dengan pendekatan secara individual maupun kelompok. RRK menerapkan inducement process dalam hal selalu memperhatikan masyarakat dengan apa yang telah diberikan olehnya. Kehadiran yang bukan hanya sekali saja memberikan rasa percaya dari masyarakat terhadap RRK. Secara tidak langsung RRK melibatkan masyarakat kepada bantuan dan program-program dari pemerintah. Dengan demikian pola pikir masyarakat ikut terbentuk baik dalam hal pemahaman politik maupun dalam hal pengelolaan kelompok.

3. *Rationalization Process (Proses Rasionalisasi)*

Proses rasionalisasi ini bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap dan perilaku yang lebih konsisten. Sikap dan perilaku yang konsisten adalah bagaimana masyarakat setia pada satu figur dalam menentukan pilihan politiknya. Hal tersebut tentu tidak mudah, RRK mempunyai strategi tersendiri dalam menerapkan *rationalization process*. Proses rasionalisasi yang dilakukan oleh RRK untuk mempertahankan kemenangan adalah dengan konsisten setiap hari Sabtu dan Minggu mengunjungi masyarakat, konsisten memberikan bantuan kepada masyarakat dan tetap mengawal apa yang telah diberikan kepada masyarakat.

4. *Confrontation Process (Proses Konfrontasi)*

Yakni mengubah perilaku sosial dalam opini publik dengan menggunakan basis kekuatan yang dimiliki untuk mengubah perilaku sosial secara masif. Setiap elemen dapat dijadikan sebuah strategi untuk memperebutkan atau mempertahankan suara didalam pemilu. Proses ini mengedepankan pada penguatan pola perilaku sosial masyarakat. Elite politik mampu menempatkan diri dalam dinamika kehidupan masyarakat, mampu

menyesuaikan apa yang diperlukan dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Temuan lapangan diketahui bahwa proses konfrontasi yang dilakukan oleh RRK adalah dengan selalu terlibat dan mempelajari kebutuhan dari masyarakat. Dengan demikian persoalan, kebutuhan dan perilaku masyarakat dapat dipahami oleh RRK. Secara masif RRK dapat merubah perilaku masyarakat yang dari awal tidak memberikan dukungan kepada RRK akhirnya simpatik dan memberikan dukungan RRK. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perolehan suara yang selalu naik setiap periode pemilihan DPRD Kabupaten Flores Timur.

KESIMPULAN

Local Strongmen adalah salah satu istilah dalam kepemimpinan politik yang merujuk pada tokoh dengan kelebihan-kelebihan yang mereka miliki serta memiliki keahlian di bidangnya, dan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. *Local strongmen* merupakan aktor lama yang masih memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan politik. Keberhasilan *local strongman* dalam mencapai monopoli dan

kontrol sosial mereka di masyarakat didasari atas tiga faktor utama. Pertama, karena sifat masyarakat yang berbentuk jejaring dimana klientilisme tumbuh subur dan berkembang. Dengan demikian kontrol sosial terfokus pada kekuatan - kekuatan yang ada, karena tidak mampu dimonopoli oleh negara. Kedua, karena mindset yang mendarah daging yang ada dalam diri orang kuat lokal di masyarakat, dan sudah menjadi simbol tersendiri di antara mereka, yang mana orang kuat menjadi panutan dikehidupan masyarakat lokal. Ketiga, kemampuan orang kuat lokal mengintervensi lembaga yang ada di daerah sehingga menjadikan alur lembaga pemerintahan disana berpihak kepada kepentingan mereka.

Local strongman yang terjadi di Kabupaten Flores Timur dibentuk dari pola kebudayaan masyarakat setempat yakni *Gemohing*. RRK menjadikan gemohing sebagai kekuatan mendasar dalam membentuk kekuatan politik dan menjadi alat dalam melayani masyarakat. Politik gemohing dalam membentuk local strongman di Kabupaten Flores Timur oleh RRK dilakukan dengan cara membentuk kelompok-kelompok kategorial di basis wilayahnya, memberikan dukungan dan bantuan kepada kelompok baik kelompok keagamaan maupun kelompok dalam

lingkup masyarakat desa, melakukan kunjungan secara berkelanjutan ke masyarakat dan selalu hadir dalam persoalan atau masalah yang terjadi di masyarakat. RRK membangun kekuatan politik dengan memberikan diri atau menanam jasa kebaikan kepada masyarakat. Gemohing hampir sama dengan relasi patron klien tetapi kekuatan gemohing lebih mengikat. Gemohing tidak hanya melihat dari salah satu elit dengan masyarakat pada umumnya tetapi mengikat satu sama lain baik secara personal maupun secara kelompok. Di samping itu gemohing tidak memandang status atau derajat sosial seseorang.

Tujuan dari politik gemohing adalah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Di samping itu, RRK perlu menerapkan strategi untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Strategi yang digunakan oleh RRK dalam mempertahankan kekuasaan politiknya adalah dengan menerapkan empat proses yakni: pertama, RRK melakukan proses penguatan; proses penguatan mengedepankan sikap dan moralitas dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, RRK tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi ataupun tindakan melawan hukum lainnya. Kedua, proses bujukan; pada proses ini RRK menerapkan cara

bujukan dengan memberikan bantuan dan tetap mengawal apa yang telah diberikan kepada masyarakat, bujukan yang dilakukan dengan cara selalu hadir di tengah masyarakat. Ketiga, proses rasionalisasi; dalam proses ini RRK menunjukkan sikap konsistennya dalam memperhatikan masyarakat, selalu mengunjungi masyarakat setiap minggu dan konsisten untuk selalu terlibat dalam kegiatan kegiatan yang ada di masyarakat. Keempat, proses konfrontasi; dalam hal ini RRK mampu mengubah perilaku sosial dalam opini publik dengan menggunakan basis kekuatan yang dimiliki untuk mengubah perilaku sosial secara masif. Setiap elemen dapat dijadikan sebuah strategi untuk memperebutkan atau mempertahankan suara dalam pemilu.

SARAN

Dari hasil penulisan ini, penulis mempunyai beberapa saran atau rekomendasi bagi RRK, Partai PDI Perjuangan, Masyarakat Flores Timur dan saran bagi peneliti selanjutnya. Pertama bagi RRK melihat daya dukungan masyarakat yang sangat besar, maka RRK harus berkoordinasi dengan partai agar pada pemilu berikutnya bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi ataupun juga maju menjadi calon legislatif di Kabupaten Flores Timur dan RRK harus

mempertahankan gaya kepemimpinan yang merakyat sehingga jangkauan politik RRK semakin luas.

Kedua, saran bagi partai PDI Perjuangan dan juga bagi partai lain yang ada di Kabupaten Flores Timur agar lebih dekat dengan masyarakat dan mampu menterjemahkan kebutuhan kebutuhan masyarakat secara utuh. Secara khusus bagi Partai PDI Perjuangan sarannya adalah tetap eksis mempertahankan kemenangan politik di Flores Timur dan lebih memperhatikan lagi kader kader yang banyak berjasa bagi partai agar mendapat posisi yang sepadan baik di partai maupun di wilayah politik Flores Timur.

Ketiga, bagi masyarakat Flores Timur agar menjadi masyarakat yang cerdas dalam menilai dan memilih calon pemimpin baik legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Flores Timur. Masyarakat harus lebih selektif dalam melihat figur politik baik dari perbuatan serta kerja nyata yang pernah dilakukan bagi masyarakat. Keempat, saran bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait adalah agar melakukan penelitian dengan cakupan tidak hanya satu elit politik tetapi lebih banyak dan lebih luas dengan jangka waktu yang lebih lama agar menemukan hasil yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyah, A. M. (2020). Kemenangan Hattrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Cirebon. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 2*,.
- Haryanto. (2015). Politik Kain Timur : Instrumen Meraih Kekuasaan. PolGov.Yogyakarta
- Holifah. (2012). Kekuatan Local Strongman dalam Pilkada Sampang. 66, 37–
- Irtanto. (2008). Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joel S. Migdal (2004) *State On Society*,Cambrigde : Cambrigde University Press.
- Minan, K. (2015). Sinergi Local Strongmen : Pengusaha dan Tokoh Agama Dalam Pemilihan Legislatif 2014 Di Demak. *Uin Suska*]. <http://digilib.uin-suka.ac.id/16848>.
- Nordholt, H. S. (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Solissa, M. (2016). Fenomena Orang Kuat Lokal Di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda Dalam. *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol. 2*.
- Tito Handoko, d. (2020). Fenomena Local Strongman. *Jurnal Moderat, Volume 6, Nomor 3*.
- Tokan, F. B. (2019, Agustus). Memahami Peran Dan Sejarah Gemohing Dalam Pembangunan Masyarakat. Dipetik Juni 1, 2021
- Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah